



PERAN STRATEGIS PENGELUARAN PARIWISATA, INFRASTRUKTUR, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH MAMMINASATA

The Strategic Role of Tourism Expenditure, Infrastructure, and Regional Revenue in Driving Economic Growth in the MAMMINASATA Region

Andi Sri Wahyuningsi^{1*}, Ahmad Kafrawi Mahmud², Ahsani Paramita³

^{1*,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*e-mail: andisriwahyuningsi2000@gmail.com

Article History: Received: august 19, 2024; Revised: september 14, 2024; Accepted: september 15, 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, infrastruktur dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Mamminasata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan jenis data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dengan *time series*. Data *cross section* dalam penelitian ini yaitu kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar, sedangkan data *time series* berupa data tahunan dari 2019 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, besaran dana alokasi untuk pengeluaran pemerintah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, bahkan di sektor tertentu jika tidak dialokasikan dengan optimal hanya akan merugikan perekonomian. Dari penelitian ini, penting untuk meningkatkan serapan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah agar dapat memberikan efek penyebaran yang lebih merata.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pariwisata, Infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study was conducted to find out whether government expenditure in the tourism sector, infrastructure sector and regional revenue affects economic growth in the Mamminasata area. This type of research is a quantitative research, using a type of panel data, which is a combination of cross section data and time series. This type of research is a quantitative research, using a type of panel data, which is a combination of cross section data and time series. The cross section data in this study is Makassar city, Maros regency, Gowa regency and Takalar regency, while the time series data is in the form of annual data from 2019 to 2023. The results show that government expenditure in the tourism sector has a positive and insignificant effect on economic growth, and government expenditure in the infrastructure sector has a negative and significant effect on economic growth, while regional revenue has a positive and significant effect on economic growth. The results of this study indicate that the amount of funds allocated for government expenditure has not been able to encourage economic growth in an



inclusive manner, even in certain sectors if not allocated optimally, it will only harm the economy. From this study, it is important to increase the absorption of funds obtained from regional revenue in order to provide a more even spread effect.

Keywords: *Government Expenditure, Tourism Sector, Infrastructure, Regional Revenue, and Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah, negara, atau daerah yang merujuk pada meningkatnya nilai dari output ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting sebagai indikator keberhasilan kebijakan ekonomi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah yang ditunjukkan oleh peningkatan produk domestik bruto (PDB), sebagai total nilai barang maupun jasa yang diperoleh oleh sebuah negara dalam batas wilayahnya (Putri, 2019).

Teori pertumbuhan ekonomi Robert Solow dan Swan, mencoba menjelaskan bagaimana ekonomi suatu negara tumbuh dalam jangka panjang bergantung pada akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Pada dasarnya, model ini melibatkan tiga faktor utama: modal (seperti pabrik dan peralatan), tenaga kerja, dan teknologi. Ide dasarnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada seberapa besar modal yang diperlukan dalam produksi, berapa banyak tenaga kerja yang tersedia, dan tingkat perkembangan teknologi (Leasiwal, 2022).

Teori Harrod Domar (Ahmad, 1961) bahwa setiap perekonomian memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatan nasionalnya untuk membeli barang-barang modal yang rusak seperti gedung, peralatan, material. Tetapi, dalam meningkatkan perekonomian, dibutuhkan juga tambahan persediaan modal yang di peroleh dari investasi-investasi baru dalam perekonomian. Apabila investasi baru dilaksanakan, maka rasio modal-output tersebut akan meningkat sebanding dengan output total. Menurut teori Harrod Domar, investasi adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk menambah stok modal, seperti pembelian mesin dan peralatan atau pembangunan infrastruktur.

Mamminasata adalah sebuah kawasan metropolitan terbesar di Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah Mamminasata memiliki tiga fungsi utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 tahun 2011 yaitu sebagai sentra pertumbuhan ekonomi dan pusat pengolahan hasil produksi; pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; serta pusat orientasi pelayanan. Pentingnya peran ini dalam pembangunan kewilayahan tidak hanya mencakup Pulau Sulawesi namun juga bagi Kawasan Timur Indonesia (Kamaruddin & Alam, 2018).

Wilayah Mamminasata terdiri dari satu kota dan tiga kabupaten, yaitu secara struktural Kota Makassar berperan sebagai wilayah inti sedangkan tiga

daerah administrasi lainnya yaitu kabupaten Maros, kabupaten Gowa (Sangguminasa) dan kabupaten Takalar dianggap sebagai wilayah penyangga. Wilayah inti dalam perkembangannya didominasi oleh pertumbuhan aktivitas perdagangan-jasa, industri, pelayanan umum, dan juga pemerintahan. Sementara itu, wilayah pinggiran mulai cenderung mengalami perkembangan pesat, meskipun tetap didominasi oleh sektor agraris (Sakawati dkk., 2019).

Penelitian (Kamaruddin & Alam, 2018), menyatakan hasilnya bahwa sektor-sektor unggulan di wilayah Mamminasata masih mengalami ketimpangan. Kota Makassar sebagai wilayah inti, memiliki lebih banyak sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dibandingkan tiga wilayah lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan tersebut yaitu keterbatasan persebaran pusat pertumbuhan, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berpusat di kota Makassar, sementara daerah lain (kabupaten Maros, kabupaten Gowa, dan kabupaten Takalar) mengalami keterbelakangan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara wilayah.

Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi wilayah Maminnasata terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar sebagai wilayah inti yang bertumbuh sepuluh kali lipat daripada wilayah penyangga yang berada dikisaran angka 120-an miliar pertahunnya, yaitu tahun 2023 sebesar Rp.140.197,90 miliar. Sementara itu, kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar hanya berada dikisaran belasan miliar pertahunnya, yaitu di tahun 2023 masing-masing wilayah penyangga sebesar Rp. 14.210,16 miliar, Rp.16.650,36 miliar, dan Rp.7.507,06 miliar (BPS Sulsel, 2024).

Pusat pertumbuhan menurut (Perroux, 1950) adalah suatu wilayah atau kawasan yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan wilayah lain sehingga wilayah tersebut dapat dianggap pusat pembangunan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini, Pertumbuhan ekonomi kota makassar yang pesat dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan agar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah penyangga.

Pertumbuhan ekonomi kota Makassar dapat memberikan efek rembesan (*Trickling-Down Effect*) (Hirschman, 1981), agar dampak pembangunannya hingga ke kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar. Sehingga, mengurangi ketidakseimbangan antara wilayah inti dengan wilayah penyangga.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kawasan Mamminasata menunjukkan kestabilan yang baik, konektivitas antara hulu (Kota Makassar) dan hilir (Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar) belum terwujud di wilayah ini, terlihat besarnya ketimpangan pertumbuhan antara wilayah inti kota Makassar dengan tiga kabupaten lainnya sebagai wilayah penyangga atau pinggiran. Oleh sebab itu, penting bagi kawasan ini untuk mengembangkan kolaborasi dan kerjasama untuk mengurangi kesenjangan antara hulu (Kota Makassar) dan hilir (Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar) dengan menciptakan konektivitas yang lebih baik dan memperkuat

hubungan ekonomi antara kota dan desa, serta memperkuat wilayah pinggiran dan memastikan efek penyebaran yang lebih merata termasuk melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembentukan modal dan pembiayaan kegiatan perekonomian. Melalui pengeluaran pemerintah, pemerintah daerah dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk (Mujasmara dkk., 2023). Teori Adolf Wagner (Prasetya, 2012), mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara, pengeluaran pemerintahnya akan cenderung meningkat terdapat permintaan yang lebih besar dari masyarakat akan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah memenuhi permintaan tersebut dengan meningkatkan pengeluarannya.

Pengeluaran pemerintah disektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Mamminasata. Hal ini tidak terlepas dari wilayah Mamminasata yang menjadi wilayah metropolitan terbesar di Indonesia timur, serta posisi kota Makassar yang menjadi lalu lintas penerbangan yang menghubungkan Indonesia bagian Barat dengan Timur Indonesia, memungkinkan Mamminasata menjadi wilayah dengan kunjungan wisatawan yang tinggi. Maka, destinasi pariwisata menjadi penting untuk dikembangkan karena dinilai dapat menjadi pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi disektor ini.

Pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata wilayah Mamminasata periode tahun 2019 sampai tahun 2023 bahwa, kota Makassar mencatat pengeluaran pemerintah di sektor pariwisatanya sebesar Rp.33.191.459.487 di tahun 2019, turun di tahun 2020 hingga tahun 2021 lalu terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebesar Rp.73.695.644.000. Sementara itu, kabupaten Maros mengalami penurunan pengeluaran dari tahun 2019 sebesar Rp.12.882.674.507 menjadi Rp.10.941.976.306 di tahun 2020 kemudian, meningkat di tahun berikutnya hingga tahun 2022 namun, kembali terjadi penurunan di tahun 2023. Kabupaten Gowa mencatat pengeluaran paling kecil di sektor ini yaitu hanya sebesar Rp.6.312.528.078 di tahun 2019, kemudian terus terjadi penurunan hingga tiga tahun berikutnya lalu menunjukkan kenaikan di tahun 2023 sebesar Rp.4.423.505.240. Sementara data yang ditunjukkan oleh Kabupaten Takalar di tahun 2019 sebesar Rp.6.720.470.917 dan mengalami penurunan pengeluaran di tahun 2020, namun di tahun berikutnya menunjukkan kenaikan sebelum akhirnya turun hingga tahun 2023 dengan pengeluaran sebesar Rp.6.317.556.063.

Sektor pariwisata yang berkembang didukung oleh Infrastruktur yang memadai, ini berarti infrastruktur seperti jalan menjadi salah satu sarana prasarana yang sangat diperhatikan, begitu pula dengan infrastruktur lainnya untuk mendukung mobilitas perekonomian daerah. Infrastruktur yang

mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan dan jembatan, menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah inti dan penyangga. Infrastruktur yang memfasilitasi aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah inti dan penyangga dapat mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Ini karena pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya logistik sehingga mobilitas barang dan jasa akan menjadi semakin lancar.

Penelitian (Ansarullah dkk., 2023), mengungkapkan bahwa di beberapa persoalan, Kabupaten Maros dan Gowa masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pusat mengenai persoalan hambatan bagi kelancaran kinerja di wilayah Mamminasata, hal ini berkaitan dengan infrastruktur yang dibangun di Kota Makassar masih belum sepenuhnya mengimbangi kebutuhan masyarakat Mamminasata sampai saat ini.

Tercatat pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di wilayah Mamminasata cenderung berfluktuatif selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat pengeluaran di wilayah inti Makassar pada tahun 2019 sebesar Rp.1.611.708.320.513 menurun di tahun 2020, Lalu peningkatan terus terjadi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.094.670.176.700. Sementara itu, wilayah penyangga yang termasuk di dalamnya yaitu kabupaten Maros, di tahun 2019 sebesar Rp.563.231.594.904, menurun di tahun 2020, dan naik di tahun berikutnya, sebelum kembali menurun di tahun 2022 hingga menjadi sebesar Rp.242.093.478.026 di tahun 2023 dan pengeluaran pemerintah kabupaten Gowa di tahun 2019 sebesar Rp.701.754.805.176 menurun di tahun 2020. Kemudian terus meningkat hingga dua tahun berikutnya, sebelum akhirnya turun menjadi sebesar Rp.214.324.906.390 di tahun 2023. Sementara kabupaten Takalar, di tahun 2019 pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebesar Rp.453.939.461.321, mengalami pengurangan di tahun 2020 lalu bertambah di dua tahun berikutnya yaitu hingga tahun 2022 dan berakhir turun menjadi sebesar Rp.365.442.350.815 di tahun 2023.

Pengeluaran pemerintah yang digunakan dengan bijak pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan daerah itu sendiri, seperti meningkatnya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah penting karena memberikan otonomi keuangan untuk pemerintah daerah, memungkinkannya dalam membiayai program-program pembangunan, operasional pemerintahan hingga pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menjadi salah satu indikator yang berkontribusi akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jika pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan menggunakannya untuk meningkatkan investasi dan infrastruktur. Peningkatan pajak dianggap sebagai "biaya" yang diterapkan pada masyarakat untuk membiayai kebijakan pemerintah (Sanjaya & Anis, 2022). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh (Mokorowu dkk., 2021), mengungkapkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan menyatakan bahwa meningkatnya pendapatan suatu daerah akan diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi.

Trend realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Mamminasata mengalami *uptrend* selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2023, bahwa kota Makassar mendominasi dalam catatan pendapatan asli daerah di wilayah Mamminasata, terhitung di tahun 2019 sebesar Rp.1.303,32 miliar sempat turun di tahun 2020 karena pandemi hingga sebesar Rp.1.078,33 miliar, namun kembali pulih di tiga tahun berikutnya hingga 2023 yaitu sebesar Rp.1.565,99 miliar. Wilayah penyangga yaitu kabupaten Maros dan kabupaten Gowa juga menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah wilayahnya, meskipun tidak setinggi kota Makassar. Pendapatan asli daerah kabupaten Gowa mampu tumbuh stabil hingga 2023 yaitu sebesar Rp.283,44 miliar bahkan di saat wilayah lainnya melemah di tahun 2020. Sementara itu, kabupaten Takalar di tahun 2019, pendapatan asli daerah wilayahnya sebesar Rp.104,83 miliar sempat bertambah di tahun 2020, namun mengalami kontraksi di tahun berikutnya hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp.45,62 miliar.

Pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata dan sektor infrastruktur yang cukup besar dan secara keseluruhan meningkat, serta besaran penerimaan daerah wilayah Mamminasata yang cukup baik diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Mamminasata. Oleh karena itu, melihat besarnya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Mamminasata, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang pesat optimal atau tidak dalam memberikan efek penyebaran kepada wilayah penyangga yang berperan sebagai penyuplai aktivitas.

Penelitian ini merupakan kebaruan dari peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan regional, kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan hubungan sosial-ekonomi antar daerah untuk melihat seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, sektor infrastruktur, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Mamminasata.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Dengan model penelitian menggunakan data panel adalah penggabungan antara data cross section dan time series. Data time series berupa data tahunan meliputi tahun 2019 sampai dengan 2023. Sedangkan data cross section sekaligus lokasi dalam penelitian ini yaitu kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui internet search dari laman Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia, serta laman web Makassarkota, Maroskab, Gowakab, dan Takalarkab. Metode analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel

dengan bantuan alat perangkat lunak atau Software Eview12 dengan Persamaan:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana Y adalah pertumbuhan ekonomi, α adalah konstanta, β_{123} adalah koefisien regresi, X_1 adalah pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, X_2 adalah pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur, X_3 adalah pendapatan asli daerah, i adalah kabupaten kota, t adalah tahun dan e adalah *error term*.

Selain itu menurut (Widarjono, 2007) ada tiga analisis data untuk melakukan metode estimasi model regresi dengan memanfaatkan data panel yaitu, pendekatan *common effect model* (COM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Setelah memilih pendekatan yang akan digunakan penting untuk memastikan model apa yang pantas digunakan, pengujian tersebut bisa ditentukan dengan melakukan beberapa pengujian seperti, Uji Chow yaitu menentukan model mana yang sebaiknya dipakai antara pendekatan model *Common Effect* atau *model Fixed Effect*; Uji Hausman yaitu untuk menentukan metode paling baik antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*; serta Uji Lagrange Multiplier yaitu membandingkan pendekatan *Common Effect* lebih tepat daripada *Random Effect*. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik, menurut (Basuki & Yuliadi, 2015) bahwa tidak semua uji asumsi klasik dipakai dalam analisis regresi panel, yang diperlukan hanya uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Terakhir yakni pengujian hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis uji asumsi klasik, digunakan uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas untuk memastikan validitas model regresi yang dihasilkan.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.631367	0.840687
X2	0.631367	1.000000	0.806451
X3	0.840687	0.806451	1.000000

Sumber: Hasil Olah Eviews, 2024

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 1 dijelaskan bahwa, koefisien korelasi antar variabel bebas $< 0,85$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Basuki & Yuliadi, 2015). Koefisien korelasi antara pengeluaran pemerintah sektor pariwisata (X_1) dan pengeluaran pemerintah untuk sektor infrastruktur (X_2) adalah sebesar $0,631367 < 0,85$, nilai tidak mencapai ambang batas artinya antara dua variabel tidak menunjukkan adanya multikolinieritas.

Koefisien korelasi antara pengeluaran pemerintah sektor pariwisata (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_3) adalah sebesar 0,840687 lebih kecil dari pada ambang batas yaitu 0,85 serta, koefisien korelasi pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) adalah sebesar $0,806451 < 0,85$.

Disimpulkan bahwa, korelasi antar variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, sektor infrastruktur dan pendapatan asli daerah tidak terdeteksi adanya gejala multikolinearitas (Sope dkk., 2019), (Widiaty & Nugroho, 2020), (Marini dkk., 2021).

Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES).

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.922378	1.582312	0.582931	0.5699
X1	-33.91575	37.01578	-0.916251	0.3762
X2	1.421619	0.902466	1.575261	0.1392
X3	-0.140858	4.570329	-0.030820	0.9759

Sumber: Hasil Olah Eviews, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa, nilai signifikansi variabel pengeluaran pemerintah sektor pariwisata sebesar 0,3762, variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur sebesar 0,1392 dan variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,9759 $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdeteksi adanya gejala heteroskedastisitas.

Estimasi Model Data Panel

Estimasi dalam analisis data panel menggunakan estimasi regresi melalui pendekatan model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* hingga pengujian pemilihan atau penentuan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui pengujian diantaranya, Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk pemilihan model terbaik dalam penelitian, apakah *Common Effect Model* lebih baik digunakan daripada *Fixed Effect Model*.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.310936	(3,13)	0.0000
Cross-section Chi-square	58.964168	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Eviews, 2024

Berdasarkan dari pengujian chow pada Tabel 3 menentukan bahwa H_0 ditolak. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,0000 < \text{signifikansi } \alpha$ yaitu $0,05$ artinya model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman digunakan untuk pemilihan model terbaik dalam penelitian, apakah *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	234.932809	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Eviews, 2024

Hasil dari Uji Hausman pada Tabel 4 menentukan bahwa model yang lebih tepat digunakan yaitu model Fixed Effect. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,0000 < \text{signifikansi } \alpha$ yaitu $0,05$ maka model Fixed Effect adalah model panel terbaik yang akan digunakan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Uji Chow dan Uji Hausman menentukan bahwa, model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect, maka pengujian selanjutnya yaitu Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel telah ditentukan setelah melewati pengestimasi dan pemilihan model paling tepat dalam penelitian ini, yaitu Fixed Effect model. Maka, hasil estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.86597	3.735592	7.727281	0.0000
X1	70.75207	87.38851	0.809627	0.4327
X2	-6.410934	2.130581	-3.009007	0.0101
X3	30.63343	10.78984	2.839101	0.0139
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999274	Mean dependent var	40.95959	
Adjusted R-squared	0.998938	S.D. dependent var	52.14104	
S.E. of regression	1.698956	Akaike info criterion	59.42916	
Sum squared resid	3.752388	Schwarz criterion	59.77767	
Log likelihood	-587.2916	Hannan-Quinn criter.	59.49720	
F-statistic	2980.450	Durbin-Watson stat	1.648089	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Eviews, 2024

Berdasarkan hasil dari Tabel 5 maka, diperoleh persamaan model dalam analisis regresi data panel penelitian ini yaitu:

$$Y_{it} = 28,86597 + 70,75207X_1 - 6,410934X_2 + 30,63343X_3 + e \quad (2)$$

Berdasarkan hasil regresi Tabel 5, dapat digunakan untuk menjawab hipotesis atau dugaan sementara yang telah dipaparkan sebelumnya dan diperoleh hasil berikut:

Hasil perhitungan Uji T dan nilai T tabel dapat dilihat pada tabel T statistik pada signifikansi 0,05 dengan $df = n - k$ dimana, n = jumlah semua data dan k = jumlah variabel, maka diperoleh hasil T tabel sebesar 1,746 atau -1,746. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka hasil uji T menunjukkan bahwa:

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X_1) dengan nilai probabilitas sebesar 0,4327 dimana nilai ini lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, dan memiliki $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu $0,809 < 1,746$ artinya, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0101 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai $-T_{hitung} < -T_{tabel}$ yaitu $-3,009 < -1,746$, artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0139 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 dan memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu sebesar $2,839 > 1,746$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan model persamaan yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai probabilitas untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X_1) yaitu sebesar $0,4327 >$ signifikansi 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_2) yaitu sebesar -6,410934. Koefisien yang bernilai negatif artinya apabila jumlah Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur naik sebesar satu rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,410934 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X_1), dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) dianggap konstan atau tetap.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) yaitu sebesar 30,63343. Koefisien yang bernilai positif artinya ada pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah Pendapatan Asli Daerah naik sebesar satu rupiah maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan

sebesar 30,63343 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel lain yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X_1), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X_2) dianggap konstan atau tetap.

Hasil dari Uji F berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa, nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,000000 < 0,05$ dan memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang diperoleh dari perhitungan F tabel pada signifikansi 0,05 dengan nilai $df_1 : df_2$ dimana $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$ (n = jumlah semua data dan k = jumlah variabel), maka diperoleh hasil F tabel sebesar 3,24. Sehingga, $2980,45 > 3,24$ artinya variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata, Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa, hasil dari uji koefisien determinasi yaitu nilai *R-squared* sebesar 0,999274 artinya sebesar 99,92% total variasi variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata, Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, dan Pendapatan Asli Daerah, sementara sisanya yaitu sebesar 0,08% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi data panel pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, Pengeluaran Pemerintah sektor Pariwisata berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti, besaran dana yang dialokasikan untuk pariwisata akan berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, namun secara statistik pengaruh tersebut cukup lemah untuk dianggap konsisten menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pengeluaran di sektor pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun bukti yang ada tidak cukup kuat untuk mengonfirmasi bahwa variabel pariwisata adalah variabel yang bisa memberikan dampak yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti alokasi dana yang kurang efektif, dampak pariwisata yang relatif kecil jika dibanding sektor lain, sehingga pengaruhnya tidak terlihat signifikan dalam analisis.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui dinas pariwisata masing-masing, bahwa potensi wisata yang ada di kawasan Mamminasata yaitu di kota Makassar terdiri dari, 12 wisata bahari, 14 wisata alam, 7 wisata sejarah, 9 wisata budaya, 1 wisata belanja dan 3 objek wisata buatan; kabupaten Maros memiliki 7 wisata utama, salah satunya taman bumi Maros Pangkep yang telah resmi ditetapkan oleh UNESCO menjadi Maros Pangkep *UNESCO Global Geopark*; kabupaten Gowa memiliki 27 daya tarik wisata, termasuk destinasi Malino Highlands; serta, kabupaten Takalar dengan 5 daya tarik wisata unggulan (MakassarKota, MarosKab, GowaKab, TakalarKab, 2024).

Berdasarkan potensi wisata yang dimiliki wilayah Mamminasata mengindikasikan bahwa promosi pariwisata yang kurang optimal menjadi salah

satu faktor penyebab tidak signifikannya pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari potensi wisata dan posisi wilayah, seperti posisi Makassar dalam pelaksanaan kegiatan bertingkat internasional yaitu *Makassar International Eight Festival Forum and Investment* atau yang dikenal dengan F8 dan destinasi belanja serta kabupaten Maros memiliki Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang telah diakui sebagai *ASEAN Heritage Park* yaitu kawasan Taman Warisan ASEAN, dilengkapi Kawasan Karst Maros-Pangkep menjadi kawasan karst terluas di Indonesia dan terluas kedua di dunia setelah karst yang ada di Cina, seharusnya mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi di wilayah ini (Admindispar, 2023) dan (Wikipedia, 2024).

Fakta kunjungan wisatawan wilayah Mamminasata didominasi dari wisatawan domestik, tercatat pada tahun 2022 Makassar dengan kunjungan wisatawan domestik sebanyak 1.695.183 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 3.352 orang, kabupaten Gowa sebanyak 777.512 orang kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara sebanyak 254 orang, kabupaten Maros dengan kunjungan wisatawan domestik sebanyak 581.878 orang dan 2.138 orang berasal dari wisatawan mancanegara, sementara itu kabupaten Takalar sebanyak 151.217 orang berasal dari kunjungan wisatawan domestik dan sebanyak 95 orang berasal dari wisatawan mancanegara (Ridwan & Susanto, 2023).

Teori Friedrich Hayek (Wepo, 2023) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah sering kali tidak efisien karena tidak beroperasi di bawah tekanan persaingan pasar. Tanpa insentif untuk menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi, kegiatan pemerintah cenderung mengalami pemborosan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hasriadi dkk., 2023) bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal ini menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, bukan hanya sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan di suatu daerah tidak menjadi penentu konsumsi, maka inovasi produk wisata perlu diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan lewat konsumsi wisatawan, bahwa inovasi melalui pengeluaran pemerintah dapat menjadi mesin pertumbuhan.

Teori pertumbuhan ekonomi Joseph A. Schumpeter 1934 (Idris, 2023) menyatakan bahwa inovasi adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi, para pengusaha (*entrepreneurs*) yang menciptakan inovasi berupa penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, atau peningkatan teknologi yang ada adalah pendorong utama dari perubahan ekonomi. Inovasi menciptakan sektor-sektor baru dalam ekonomi yang sebelumnya tidak ada dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk akumulasi modal termasuk untuk investasi lebih lanjut. Keuntungan ekonomi yang besar dapat diperoleh dengan berhasil meluncurkan inovasi yaitu menciptakan sesuatu yang unik dan berbeda, sehingga dapat menarik konsumen dan mendapatkan pangsa pasar.

Teori *multiplier effect* Keynesian (Gumelar, 2020) mengemukakan, bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda terhadap perekonomian.

Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, akan mendorong peningkatan permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini kemudian memicu peningkatan produksi, serapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya kembali meningkatkan konsumsi dan investasi.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian (Agusta & Fikriah, 2018) serta (Manesanulu, 2024), mengemukakan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pariwisata dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sektor pariwisata memiliki *multiplier effect*, misalnya promosi destinasi wisata, atau penyelenggaraan acara-acara besar akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa terkait dengan pariwisata. Menarik lebih banyak wisatawan yang kemudian membelanjakan uang mereka, permintaan ini akan merangsang produksi sektor-sektor terkait, seperti transportasi, perhotelan, restoran, dan perdagangan. Pendapatan tambahan yang diperoleh oleh pekerja dan bisnis kemudian dibelanjakan kembali dalam perekonomian, hal ini pada akhirnya menciptakan efek berantai yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, semakin besar pengeluaran Pemerintah untuk sektor infrastruktur hanya akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya dana yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur menjadi bagian alasan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan merugikan pertumbuhan ekonomi Mamminasata, kebutuhan dana yang cukup besar mengakibatkan pembangunan salah satu infrastruktur yaitu jalan tol yang menghubungkan wilayah Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar yang diusulkan dalam Proyek Strategis Nasional pada tahun 2020 dikeluarkan pada tahun 2022 karena diperkirakan tidak dapat selesai pada tahun 2024, alasan keterbatasan dana untuk pengadaan tanah proyek (Suhra, 2022).

Tim riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Riadi dkk., 2021) mengemukakan bahwa pembangunan tempat penampungan akhir (TPA) regional Mamminasata terkesan diabaikan, banyak infrastruktur pengelolaan sampah yang telah rusak dan dibiarkan begitu saja menyebabkan daya resapan air tidak maksimal sehingga ketika musim hujan tiba terjadi banjir akibatnya seluruh sektor pembangunan mengalami penundaan.

Alasan lainnya adalah penganggaran pembangunan infrastruktur terhitung fokus pada wilayah inti saja sementara wilayah penyangga belum optimal menyusul pembangunan infrastruktur Kota Makassar, akibatnya mobilitas barang dan jasa memperlambat pergerakan ekonomi di wilayah pinggiran (Arman, 2022). Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya operasional, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta memperluas akses ke pasar, namun pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang relatif lama agar manfaatnya dapat terlihat atau dirasakan, yaitu terdapat *time lag*

ketika pemerintah menyalurkan anggaran untuk sektor infrastruktur dalam memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Mamminasata (Prabowo & Alexander, 2019).

Teori yang sejalan dengan hasil penelitian ini dikemukakan oleh Milton Friedman (Admin, 2022) bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk layanan publik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Friedman berpendapat, bahwa pengeluaran pemerintah yang besar dapat menyebabkan efek "*crowding out*," di mana investasi swasta berkurang karena dana yang tersedia di pasar modal diambil oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, hal ini dapat mempengaruhi harga dan kualitas barang dan jasa, serta mengganggu kegiatan sektor swasta dan menghasilkan biaya yang tidak efisien.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu (Shidiqi, 2021) dan (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022) yang menunjukkan temuannya bahwa, variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Ahmed & Miller, 1999), bahwa terdapat dua pandangan berbeda tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan tradisional, berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang dapat menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini meningkatkan biaya modal, yang berpotensi mengurangi investasi swasta dan sekaligus menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, pandangan non-tradisional berargumen bahwa pengeluaran pemerintah justru dapat mendorong investasi, terutama di negara berkembang. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, dapat merangsang minat investor untuk menanamkan modal mereka. Peningkatan infrastruktur tersebut menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan (Agusta & Fikriah, 2018) dan (Ladung, 2018), bahwa temuannya menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah yang difokuskan pada infrastruktur ekonomi dan sosial dapat bertindak sebagai stimulator yang memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hulten & Schwab, (1993), memperkenalkan *new growth theory* yang mencoba menyampaikan pentingnya infrastruktur untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur, dalam hal ini dianggap menjadi bagian dari faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi terhadap infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi data panel yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak perolehan Pendapatan Asli Daerah maka akan menyebabkan semakin tingginya Pertumbuhan Ekonomi. Meningkatnya pendapatan asli daerah memberikan pemerintah fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi dalam pembentukan modal dan pembiayaan kembali kegiatan perekonomian. Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan fiskal Mamminasata optimal untuk digunakan kembali dalam bentuk belanja guna mendanai lancarnya kegiatan perekonomian.

Ketimpangan penerimaan pemerintah dari pendapatan asli daerah wilayah Mamminasta dikarenakan posisi wilayah, dimana Makassar sebagai kota inti di dominasi oleh sektor-sektor seperti industri, perdagangan dan konstruksi yang bertumbuhannya lebih cepat daripada wilayah penyangga seperti kabupaten Maros, Gowa dan Takalar yang di dominasi oleh sektor pertanian yang pertumbuhan ekonominya cenderung lebih lambat. Efek sebaran (*spread effect*) memainkan peran penting di wilayah Mamminasata yaitu wilayah inti menciptakan permintaan yang besar untuk barang dan jasa dari wilayah penyangga, wilayah penyangga menyediakan bahan baku, tenaga kerja, atau menjadi pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah inti. Ketika ekonomi di wilayah inti tumbuh, permintaan untuk produk dan layanan dari wilayah penyangga juga meningkat, sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga (Yanuar dkk., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri, 2019), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan pendapatan asli daerah dianggap sebagai modal dalam proses pertumbuhan ekonomi, diperkuat oleh hasil penelitian (Mokorowu dkk., 2021), Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk meningkatkan pengembangan daerah dan mengelola potensi daerah sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah sebagai ukuran mandiri keuangan sebuah daerah, mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan wilayah Mamminasata dalam membiayai sendiri kegiatan ekonomi dan pembangunannya lebih besar dan memperkecil ketergantungan terhadap pembiayaan atau bantuan dari pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhannya. Pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi wilayah Mamminasata, mengimplikasikan bahwa tingginya kemampuan pungutan pemerintah terhadap daerah Mamminasata. Dalam kebijakan fiskal kontraktif, peningkatan pajak akan mengurangi belanja, ini berarti optimalnya wilayah Mamminasata dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Daerahnya karena terbukti Pendapatan Asli Daerah signifikan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Teori Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 2001) mengenai toleransi pajak, bahwa masyarakat akan lebih memahami besaran pungutan pajak yang diterapkan pemerintah jika digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah termasuk untuk meningkatkan investasi dan infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah berarti ketika pemerintah meningkatkan pajak, pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan kembali untuk mendanai kegiatan perekonomian. Meskipun beban pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi individu, namun dapat meningkatkan investasi pemerintah terhadap layanan publik yang didanai dari Pendapatan Asli Daerah. Misalnya, pajak tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam program redistribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Seperti, program bantuan sosial atau investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, seperti transportasi dapat mengurangi biaya, efisien dan meningkatkan konektivitas (Sinaga dkk., 2023).

Organ theory oleh Otto von Gierke (Idhom, 2022), menyatakan bahwa negara adalah suatu kesatuan di mana setiap warga negara terikat, Negara memiliki hak untuk membebankan kewajiban-kewajiban kepada warganya, termasuk kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dibenarkan karena negara dianggap sebagai lembaga yang menjamin kehidupan dan kesejahteraan warga negara. Dengan demikian, pemungutan pajak oleh negara tidak hanya sah, tetapi juga diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam mendukung masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rizal dkk., 2021) dan (Maitulung dkk., 2023), bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Meningkatnya pendapatan asli daerah belum dapat memberikan dampak yang baik. Dimana ketika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, tidak dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Teori Arthur Laffer (Rezy & Tsaqofi, 2023), berargumen bahwa ekonomi yang tidak tumbuh bukan disebabkan oleh kurangnya permintaan, melainkan oleh beban pajak yang terlalu tinggi. Tarif pajak yang tinggi mengurangi insentif bagi produsen untuk meningkatkan output dan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam pandangannya, jika tarif pajak mencapai 0 persen, artinya pemerintah tidak memungut pajak sama sekali sehingga pemerintah tidak akan mendapatkan keuntungan dari pajak. Sebaliknya, pada tingkat pajak 100 persen, seluruh keuntungan dan pendapatan dari bisnis dan rumah tangga diambil sebagai pajak oleh pemerintah. Sehingga, para wajib pajak akan enggan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan dalih, uang yang susah payah didapatkan akan habis untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar, pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat disampaikan penulis dari hasil penelitian ini diantaranya yaitu, terkait pengeluaran pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata, penting bagi pemerintah wilayah Mamminasata terus melakukan promosi, pemasaran dan peningkatan fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Promosi melalui media digital menjadi salah satu kegiatan yang dapat memperluas jangkauan promosi. Sementara itu, untuk dukungan di sektor infrastruktur, melihat besarnya anggaran untuk belanja infrastruktur maka penting bagi pemerintah wilayah Mamminasata untuk mengelolah anggaran dengan bijak dan berfokus pada proyek yang bisa memobilisasi lancarnya jangkauan ke wilayah-wilayah penyangga dan fokus pada proyek yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah terkait untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam mengatasi ketergantungan pada satu jenis penerimaan dan memaksimalkan potensi pajak, retribusi dan penerimaan lainnya dengan memanfaatkan teknologi dalam efisiensi dan efektivitas pengumpulan pendapatan asli daerah seperti melalui sistem pajak online dan digitalisasi layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Agusta, M. H. E., & Fikriah, F. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 440–451.
- (2) Ahmad, S. (1961). Harrod on Domar's Theory of Growth. *The Economic Journal*, 71(282), 449–451. <https://doi.org/10.2307/2228796>
- (3) Ahmed, H., & Miller, S. M. (1999). Crowding-Out and Crowding-In Effects of the Components of Government Expenditure Department of Economics Working Paper Series. *Economics Working Papers*, 02(July), 19. http://digitalcommons.uconn.edu/econ_wpapers Recommended

- (4) Ansarullah, A., Surya, B., & Syafri, S. (2023). Potensi Pengembangan Infrastruktur Jalan Tol Mamminasata. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(1), 20–30. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3948>
- (5) Arman, R. S. A. (2022). *Berharap Konsep Mamminasata, Wujudkan Tata Ruang Terpadu*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/23/berharap-konsep-maminasata-wujudkan-tata-ruang-terpadu>
- (6) Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Electronic data processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Yogyakarta: *Danisa Media*.
- (7) BPS Sulsel, 2024. (2024). *[Seri 2010] PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2022-2023*. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY2NiMy/-seri-2010-pdrb-kabupaten-kota-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>
- (8) Gumelar, G. (2020). *Teori Keynesian dalam Ekonomi*. <https://pluang.com/blog/glossary/keynesian-economy>
- (9) Hasriadi, Yusuf Qamaruddin, M., & Rajiman, W. (2023). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VII(2), 387–394.
- (10) Hirschman, A. O. (1981). *Essays in trespassing: Economics to politics and beyond*. Cambridge University Press.
- (11) Hulten, C. R., & Schwab, R. (1993). *Endogenous growth, public capital, and the convergence of regional manufacturing industries*. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
- (12) Idhom, : Addi M. (2022). *Teori Pemungutan Pajak & Asas Pemungutan Pajak Menurut para Ahli*. <https://tirto.id/teori-pemungutan-pajak-asas-pemungutan-pajak-menurut-para-ahli-guuz>
- (13) Idris, M. (2023). *Mengenal Teori Joseph Schumpeter, Prinsip, dan Pihak yang Mempengaruhi*. <https://money.kompas.com/read/2023/12/02/002900626/mengenal-teori-joseph-schumpeter-prinsip-dan-pihak-yang-mempengaruhi>
- (14) Kamaruddin, C. A., & Alam, S. (2018). Analisis potensi sektor unggulan dan pemetaan kemiskinan masyarakat di wilayah Mamminasata Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(2), 85–98.
- (15) Ladung, F. (2018). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare*. 1, 20–30.
- (16) Leasiwal, T. C. (2022). *Teori–Teori Pertumbuhan Ekonomi dan*

Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi. CV. Mitra Cendekia Media.

- (17) Maitulung, A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 145–156.
- (18) MakassarKota, MarosKab, GowaKab, TakalarKab, 2024. (2024). *Potensi Pariwisata*. <https://makassarkota.go.id/potensi/potensi-pariwisata/>; <https://maroskab.go.id/potensi-pariwisata/>; <https://pariwisata.gowakab.go.id/>; <https://disdikbud.takalarKab.go.id/2024/05/24/jelajahi-keindahan-takalar-sulawesi-selatan-destinasi-wisata-yang-menawan/>
- (19) Manesanulu, A. K. (2024). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dimediasi Oleh Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- (20) Marini, M., Wildayana, E., & Adriani, D. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dari Sisi Penawaran Agregat Di Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 4(2), 93–103. <https://doi.org/10.46774/pptk.v4i2.452>
- (21) Mokerowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(4), 81–94.
- (22) Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997.
- (23) Perroux, F. (1950). Economic space: theory and applications. *The Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104.
- (24) Prabowo, D., & Alexander, H. B. (2019). *Ada "Time Lag" Dampak Pembangunan Infrastruktur*. <https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/170000821/ada-time-lag-dampak-pembangunan-infrastruktur>
- (25) Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*.
- (26) Putri, H. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 237–251.

- (27) Rezy, F., & Tsaqofi, I. A. (2023). *Apa itu Kurva Laffer? Kebijakan Tarif Pajak yang Dapat Mengerek Pertumbuhan Ekonomi*. <https://voi.id/ekonomi/310315/apa-itu-kurva-laffer>
- (28) Riadi, S., Riszky, M., Anas, A., Mirajanna, & Maulana, A. (2021). *Dari hulu ke hilir persepsi dan pengelolaan sampah di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata*.
- (29) Ridwan, M., & Susanto, Y. (2023). Tourist Movement Patterns in the Mamminasata Region. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 11(2), 129–146. <https://doi.org/10.35814/tourism.v11i2.6013>
- (30) Rizal, Y., Iskandar, & Wati, D. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh. *Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Vol 5 No 1*.
- (31) Sakawati, H., Widyawati, W., & Rukmana, N. S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 258–272.
- (32) Sanjaya, I., & Anis, A. (2022). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 3(2016).
- (33) Shidiqi, M. R. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1969-2019. *Bps.Go.Id*. http://repository.upi.edu/69186/6/T_PEKO_1701387
- (34) Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Collyn, D., & Hutauruk, R. P. S. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias: mediasi belanja modal. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1070. <https://doi.org/10.29210/020232729>
- (35) Sope, I. I., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 99–109.
- (36) Suhra, N. wardyah. (2022). *Proyek jalan tol Mamminasata dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional*. <https://makassar.antaraneews.com>
- (37) Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 189–204. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.270>
- (38) Wepo. (2023). *Pemikiran Ekonomi Friedrich August von Hayek*. <https://an-nur.ac.id/esy/pemikiran-ekonomi-friedrich-august-von-hayek.html>

- (39) Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- (40) Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043>
- (41) Yanuar, M. A., Dewi, R. S., Handayani, W., & Yuwanti, S. (2023). Perkembangan Metropolitan Mamminasata: tinjauan kesenjangan aspek sosial-ekonomi dan tata kelola wilayah. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 194. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.60006>